



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 119 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 94 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN KADUNGORA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 94 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Kadungora Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 94 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Kadungora Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 94 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Kadungora Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 94);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 94 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN KADUNGORA TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 94 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Kadungora Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 94) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 119

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 119 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 94
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
KERJA KECAMATAN KADUNGORA
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 dalam Renstra, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Renja Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut Tahun 2023 selanjutnya menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja (Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan

hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Renja berkenaan;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dalam rangka pelayanan dasar masyarakat, pemenuhan belanja daerah yang bersifat mengikat dan bersifat wajib.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD.

Kebutuhan terhadap perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 terjadi karena aspek perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, harus dilaksanakan secara adil dan selaras untuk merespon berbagai dinamika yang berkembang. Dari sisi nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan melalui proses pemetaan (*mapping*) terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RKPD, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam perjalanannya setelah Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kadungora Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 98 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Kadungora Tahun 2023, perlu dilakukan penyesuaian kembali pada Perubahan Renja Kecamatan Kadungora Tahun 2023, didasarkan pada terbitnya beberapa ketentuan yang mendorong perlunya penyesuaian terhadap kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, antara lain yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

- Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023;
- b. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
 - c. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
 - e. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tanggal 10 Maret 2023 hal Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023.
 - f. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023;
 - g. Peraturan Bupati Garut Nomor XX Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2023 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
 - j. Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dalam rangka pelayanan dasar masyarakat, pemenuhan belanja daerah yang bersifat mengikat dan bersifat wajib.

1.2. Dasar Hukum Perubahan Renja Tahun 2023

Landasan hukum dalam penyusunan perubahan Renja Tahun 2023 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
21. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 183); Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);

23. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 287);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926));
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 866);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Provinsi Jabar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 6);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);

41. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 15);
44. Peraturan Bupati Garut Nomor 98 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Kadungora Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 98)

1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Tahun 2023

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 99 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan

Kadungora Tahun 2023, sebagai pedoman penyusunan KUPA - PPASP Kabupaten Garut Tahun 2023 untuk menyusun perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Tahun 2023 adalah untuk :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
- b. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2023;
- c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kadungora Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Perubahan Renja Tahun 2023

Memuat penjelasan tentang latar belakang dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

1.2 Dasar Hukum Perubahan Renja Tahun 2023

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan Perubahan Renja Tahun 2023

(1) Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

(2) Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

- 2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Kadungora adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi atau UPT/UPTD dan elemen masyarakat. Sesuai dengan Visi dan Misi Kecamatan Kadungora yang salah satunya poin penting untuk Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur yang handal disiplin kreatif dan inovatif dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Pengukuran Indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Kadungora berdasarkan pedoman pengukuran Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah. Pada unit kerja setingkat eselon III SKPD / Unit kerja mandiri sekurang - kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Kadungora disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Kadungora bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2019 - 2024 yaitu terciptanya system pemerintahan yang baik dan demokrasi. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Kadungora dalam mendukung keberhasilan pembangunan 2019 - 2024 sebagai mana tercantum dalam RPJMD.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Kabupaten Garut perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap pembangunan kabupaten garut secara

umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian oprasionalisasi dan berkaitan terhadap peran Misi yang telah ditetapkan, secara umum terdapat 4 (empat) tujuan dasar dalam pembangunan Kabupaten Garut dalam 5 (lima) tahun mendatang yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kehidupan Masyarakat Yang Berdasarkan Nilai - Nilai Agama dan Sosial. Meningkatkan SDM dan kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai - nilai sosial dan agama merupakan tugas utama pemerintah.

Kualitas hidup masyarakat oleh UNDP diukur dengan pendidikan, Indeks Kesehatan dan indeks prioritas daya beli. Untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat diperlukan adanya sinkronisasi dan harmonisasi program dari seluruh satuan kerja yang ada.

2. Meningkatkan Perekonomian Yang Ada dan Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian Ekonomi.

Meningkatnya perekonomian daerah akan mendorong stabilitas perekonomian daerah. Ketidak stabilan perekonomian daerah akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat. Tantangan terbesar Pemerintah daerah kedepan adalah bagaimana meningkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam mewujudkan kemandirian daerah, yang diikuti dengan pemerataan pendapatan dimasyarakat.

Peningkatan daya saing daerah, kebijakan dan strategi dan pembangunan daerah merupakan salah satu amanah dalam era otonomi daerah sebagai mana ditetapkan dalam Undang - Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, indikator keberhasilan meningkatnya daya saing daerah adalah peningkatan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.

3. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Berkelanjutan.

Penyelenggara mengelola pemerintahan yang baik, bersih dan berkelanjutan kebutuhan bersama yang harus dicapai oleh pemerintah daerah. Untuk mewujudkan mengelola yang baik terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan pembenahan :

a. Mengupayakan semaksimal mungkin peran masyarakat dalam proses pembuatan keputusan.

- b. Menegakan rule of law kekuatan hukum secara adil
- c. Menciptakan transparansi dalam arus informasi
- d. Membangun akuntabilitas publik dengan berusaha agresif keputusan harus dipertanggung jawabkan kepada publik dan lembaga - lembaga stakeholder.
- e. Mengupayakan agar semua lembaga dan prosedur siaga dan tanggap dalam pelayanan setiap kebutuhan stakeholder Warga Negara.
- f. Seluruh komponen pemerintah harus mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh komponen masyarakat.
- g. Mengelola lembaga pemerintah secara efektif dan efisien sehingga produk lembaga dan prosesnya dilaksanakan tepat sasaran dan hemat.
- h. Setiap pemimpin mempunyai Visi yang strategis dalam mencapai Good governance dengan mengembangkan kualitas SDM masing - masing.

4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan Sesuai Dengan Peruntukannya.

Pengelolaan sumber daya daerah yang berkelanjutan ditujukan dalam rangka memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan kegunaan sumber daya alam serta lingkungan hidup dengan tetap menjaga lingkungan fungsi daya dukung dan daya saing kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan. Melalui pemanfaatan yang serasi, pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan, kenyamanan kehidupan, pemeliharaan, pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Indikator keberhasilan tujuan meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah penanganan lahan kritis yang dapat terjadi karena faktor alam dan manusia.

Lahan kritis dapat berupa tanah tandus ataupun hutan yang gundul, kondisi ini dapat mengakibatkan kurang produktif lahan dan pada tingkat yang lebih parah dapat menimbulkan bencana, tanah longsor,

banjir dan kebakaran. Sebagian besar lahan kritis terjadi akibatnya ada alih fungsi hutan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

2.1.1 Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Kadungora sampai dengan triwulan II tahun 2023

Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Kecamatan Kadungora sampai dengan triwulan II tahun 2023 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Kadungora Tahun Anggaran 2023. Adapun Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Kecamatan Kadungora sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023		
		Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.372.971.341	1.357.067.032	44,98
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.643.900	0	0,00
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.384.500	0	0,00
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0,00
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0,00
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0	0,00
1.5	Koordinasi dan Penyusunan	0	0	0,00

	Perubahan DPA-SKPD			
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0,00
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.259.400	0	0,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.030.731.541	955.262.288	47,18
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.024.733.341	955.262.288	47,04
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.998.200	0	0,00
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.627.800	14.627.800	100,00
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14.627.800	14.627.800	100,00
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0,00
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.950.940	66.979.900	33,33
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.626.600	2.113.300	27,71
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.612.061	22.773.600	52,22
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.941.700	4.350.200	73,21
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.404.400	6.123.400	45,68
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan	6.720.000	3.360.000	50,00

	Peraturan Perundang-undangan			
4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.104.000	4.210.000,00	41,67
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.000.000	3.750.000	41,67
4.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.299.400	20.299.400	100,00
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84.242.779	0	0,00
5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0,00
5.2	Pengadaan Mebel	0	0	0,00
5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84.242.779	0	0,00
5.4	Pengadaan Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0,00
5.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	97,56
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.966.160	25.206.944	40,67
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.404.560	6.648.744	32,58
6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.890.000	7.100.000	47,68
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26.671.600	11.458.200	42,96
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	54.051.000	14.694.400	27,18

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.351.000	14.694.400	68,82
7.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.700.000	0	0,00
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	149.168.700	34.907.700	23,40
1.	Koordinasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Vertikal Terkait	82.659.000	3.650.000	4,41
1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Denganperangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	5.700.000	2.150.000	37,72
1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	76.959.000	1.500.000	1,95
2.	Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Yang Ada Di Kecamatan	66.509.700	31.257.700	47
2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan	60.980.500	26.778.500	43,91

2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.529.200	4.479.200	81,01
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	43.114.800	18.757.400	43,50
1.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	13.114.800	6.257.400	47,71
1.1	Pembentukan Dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara	6.257.400	6.257.400	100,00
1.2	Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat	6.857.400	0	0,00
2.	Kegiatan Koordinasi PPKM Tingkat Desa	30.000.000	12.500.000	41,67
2.1	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	30.000.000	12.500.000	41,67
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	196.685.600	91.985.000	46,76
1.	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Upaya Keamanan dan Ketertiban Umum	196.685.600	91.985.000	46,76

1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	147.457.200	61.250.000	41,54
1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	49.228.400	30.735.000	62,43
2.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	0	0,00
2.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	0	0	0,00
2.2	Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	0	0,00
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	199.279.400	92.258.000	46,29
1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	199.279.400	92.258.000	46,29

1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	14.763.400	0	0,00
1.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	184.516.000	92.258.000	50,00
1.3	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	0	0,00
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	55.674.800	42.387.600	76,13

1.	Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	55.674.800	42.387.600	76,13
1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	28.696.800	15.409.600	53,70
1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	13.138.000	13.138.000	100,00
1.3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	13.840.000	13.840.000	100,00
	JUMLAH	3.016.894.641	1.357.067.032	44,98

Sumber : Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2023

Dari tabel diatas, menggambarkan perbandingan pagu anggaran Tahun 2023 terhadap realisasi Tahun Anggaran. 2023, dari total pagu anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 3.016.894.641,-, melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2023 dalam pelaksanaannya pada Tahun Anggaran 2023, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. **1.357.067.032,-** atau sebesar **44,98%**.

2.1.2. Tingkat Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi Renja Tahun 2023, diperoleh rata-rata tingkat capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Kadungora s.d. Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan
Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/ kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian kinerja Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (s.d Triwulan II Tahun 2023) yang dievaluasi	
			K	K	K	K	K	K		
1	3	4	5				7			
	Urusan Kewilayahan		500	%	287,22	%	100	%	43,77	%
	Bidang Urusan Pemerintahan Bidang kecamatan		500	%	287,22	%	100	%	43,77	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	500	%	286,67	%	100	%	47,23	%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	5	Bulan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	10	Dokumen	6	Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	5	Bulan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	5	Bulan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	Laporan	3	Laporan	1	Laporan	0	Laporan

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	5	Bulan
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	85	Stel	51	Stel	17	Stel	17	Stel
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	Orang	6	Orang	3	Orang	0	Orang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	5	Bulan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	50	Item	30	Item	10	Item	5	Item
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	205	Jenis	123	Jenis	41	Jenis	24	Jenis
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	80	Item	48	Item	16	Item	10	Item
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	5	Bulan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	360	Eksemplar	216	Eksemplar	72	Eksemplar	33	Eksemplar
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	6820	Orang	4.092	Orang	1364	Orang	581	Orang
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3000	OH	1.800	OH	600	OH	250	OH
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	5	Bulan
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit
	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	0	Item	0	Item	0	Item	0	Item
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Memadai	1	Item	1	Item	1	Item	0	Item
	Pengadaan Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	5	Bulan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	5	Bulan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	15	Item	9	Item	3	Item	2	Item
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	60	bulan	36	bulan	12	bulan	5	bulan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	5	Bulan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	40	Unit	24	Unit	8	Unit	4	Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	10	Unit	4	Unit	0	Unit	0	Unit
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	500	%	290,53	%	100	%	20,85	%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	5	Bulan
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	40	Kegiatan	24	Kegiatan	8	Kegiatan	3	Kegiatan
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	5	Bulan

	Daerah yang ada di Kecamatan	oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan PATEN di Kecamatan	20	Laporan	12	Laporan	4	Laporan	2	Laporan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	500	%	300	%	100	%	45	%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	5	Bulan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	5	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	Laporan	0	Laporan	4	Laporan	2	Laporan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	24	Bulan	0	Bulan	12	Bulan	5	Bulan
	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	500	%	299,9	%	100	%	27,11	%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	5	Bulan
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	20	kali	12	kali	4	kali	2	kali
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	5	Kegiatan	2	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	36	kali	12	kali	12	kali	5	kali
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	500	%	291	%	100	%	30,68	%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	5	Bulan
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	3	Kali	1	Kali	1	Kali	0	Kali
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	6	Kali	2	Kali	2	Kali	0	Kali
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam	60	Kali	36	Kali	12	Kali	5	Kali
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	500	%	292,62	%	100	%	74,80	%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60	Bulan	36	Bulan	12	Bulan	5	Bulan
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20	Kali	12	Kali	4	Kali	2	Kali
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	40	Desa	24	Desa	8	Desa	0	Desa
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen RPTK	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen

1. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1) Realisasi program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari 6 (enam) program yang dilaksanakan Kecamatan Kadungora sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, belum ada Program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari 14 (empat belas) kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Kadungora sampai dengan triwulan II Tahun 2023, belum ada Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

3) Realisasi sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Kadungora sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, ada 5 (lima) Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :

(1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dari total anggaran sebesar Rp. 14.627.800,- realisasi sebesar Rp. 14.627.800,- atau (100%)

(2) Penatausahaan Arsip Dinamis dari total anggaran sebesar Rp. 20.299.400,- realisasi sebesar Rp. 20.299.400,- atau (100%)

(3) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif dari total anggaran sebesar Rp. 13.840.000,- realisasi sebesar Rp. 13.840.000,- atau (100%)

(4) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara dari total

anggaran sebesar Rp. 6.257.400,- realisasi sebesar Rp. 6.257.400,- atau (100%)

- (5) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari total anggaran sebesar Rp. 13.138.000,- realisasi sebesar Rp. 13.138.000,- atau (100%)

1. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Sampai dengan Triwulan II tahun 2023, di Kecamatan Kadungora tidak ada Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.

3.1 Faktor penyebab belum tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan masih dilaksanakan pada triwulan III dan IV sehingga belum terserap seluruhnya.
- 2) Adanya perubahan harga pasar sehingga untuk belanja barang dan belanja modal tidak terserap seluruhnya.
- 3) Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;

3.2 Faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan adalah dikarenakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana.

1. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kadungora adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kadungora tahun 2023 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Kadungora pada umumnya.

b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kadungora berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Kadungora.

2. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab belum tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :

a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.

b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

c. Perlu adanya percepatan penyerapan anggaran pada Triwulan III dan IV.

Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Kadungora sampai dengan Triwulan II tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut
Periode Pelaksanaan Tahun 2023 TW II

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)				Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan						
																				I		II			K	Rp.					K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
																				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)																	
1	2					3	4	5				6				7				8				9				12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100	16	17							
7						Urusan Kewilayahan		500	%	15.706.871.414	287,22	9.000.628.184	100	2.907.076.042	21,40	539.503.639	22,38	564.087.492	43,77	1.103.591.131	43,77	43,77	330,99	10.104.219.315	66,20	64,33	Kecamatan Kadungora													
7	1					Bidang Urusan Pemerintahan Bidang kecamatan		500	%	15.706.871.414	287,22	9.000.628.184	100	2.907.076.042	21,40	539.503.639	22,38	564.087.492	43,77	1.103.591.131	43,77	43,77	330,99	10.104.219.315	66,20	64,33	Kecamatan Kadungora													
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	500	%	14.349.714.161	286,67	8.172.936.324	100	1.999.457.658	22,33	446.504.819	24,90	497.804.912	47,23	944.309.731	47,23	47,23	333,90	9.117.246.055	66,78	63,54	Kecamatan Kadungora													
7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	Bulan	74.572.590	36	51.250.800	12	8.084.680	3	1.049.300	2	1.853.440	5	2.902.740	41,67	35,90	41	54.153.540	68,33	72,62	Kecamatan Kadungora													
7	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5	Dokumen	50.684.964	3	42.582.400	1	4.456.180	-	1.049.300	1	1.853.440	1	2.902.740	100,00	65,14	4	45.485.140	80,00	89,74	Kecamatan Kadungora													
7	01	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	1.200.000	0	0	1	587.800	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Kadungora												

7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	1.200.000	0	0	1	587.800	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Kadungora			
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	1.200.000	0	0	1	587.800	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Kadungora		
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	1.200.000	0	0	1	587.800	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Kadungora		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Dokumen	1.200.000	0	0	1	560.400	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Kadungora		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	10	Dokumen	17.887.626	6	8.668.400	2	716.900	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	6	8.668.400	60,00	48,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Kadungora		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60	Bulan	6.089.684.842	36	3.523.173.088	12	1.332.909.823	3	262.973.833	2	271.519.022	5	534.492.855	41,67	40,10	41	4.057.665.943	68,33	66,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Kadungora		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	6.075.436.972	36	3.515.536.088	12	1.331.117.423	3	262.973.833	2	271.519.022	5	534.492.855	41,67	40,15	41	4.050.028.943	68,33	66,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Kadungora	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	Laporan	14.247.870	3	7.637.000	1	1.792.400	-	-	-	0	-	-	-	-	-	3	7.637.000	60,00	53,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Kadungora	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60	Bulan	95.647.575	36	38.702.460	12	23.070.200	3	8.070.200	2	0	5	8.070.200	41,67	34,98	41	46.772.660	68,33	48,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Kadungora	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	85	Stel	41.032.575	51	24.002.460	17	8.070.200	17	8.070.200	-	0	17	8.070.200	100,00	100,00	68	32.072.660	80,00	78,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Kadungora	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	Orang	54.615.000	6	14.700.000	3	15.000.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	6	14.700.000	50,00	26,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Kadungora	

7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	Bulan	1.025.768.172	36	616.547.567	12	93.409.100	3	23.268.500	2	12.667.490	5	35.935.990	41,67	38,47	41	652.483.557	68,33	63,61	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	50	Item	20.666.198	30	13.258.570	10	3.733.200	5	1.244.400	-	0	5	1.244.400	50,00	33,33	35	14.502.970	70,00	70,18	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	205	Jenis	524.349.788	123	309.769.074	41	29.827.200	14	7.424.800	10	4.846.400	24	12.271.200	58,54	41,14	147	322.040.274	71,71	61,42	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	80	Item	69.105.125	48	19.292.033	16	1.571.600	10	1.571.600	-	0	10	1.571.600	62,50	100,00	58	20.863.633	72,50	30,19	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	60	Bulan	86.678.847	36	41.343.150	12	16.997.800	3	4.308.000	2	2.901.690	5	7.209.690	41,67	42,42	41	48.552.840	68,33	56,01	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	360	Eksempla	15.081.394	216	9.414.240	72	4.879.200	18	1.219.800	15	813.200	33	2.033.000	45,83	41,67	249	11.447.240	69,17	75,90	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	6820	Orang	109.249.140	4.092	61.451.000	1364	21.078.200	341	4.980.000	240	1.916.200	581	6.896.200	42,60	32,72	4.673	68.347.200	68,52	62,56	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3000	OH	200.637.680	1.800	66.006.000	600	10.320.000	150	1.460.000	100	2.190.000	250	3.650.000	41,67	35,37	2.050	69.656.000	68,33	34,72	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Dokumen	11.000.000	0	0	1	5.001.900	-	1.059.900	-	0	-	1.059.900	-	21,19	-	1.059.900	-	9,64	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60	Bulan	6.636.087.400	36	3.757.392.768	12	465.726.855	3	139.974.400	2	199.509.400	5	339.483.800	41,67	72,89	41	4.096.876.568	68,33	61,74	Kecamatan Kadungora

7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10	Unit	522.426.000	4	523.609.400	1	35.144.800	-	-	-	0	-	-	-	4	523.609.400	40,00	100,23	Kecamatan Kadungora		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	10	Item	144.612.300	6	65.939.448	0	0	-	-	-	0	-	-	-	6	65.939.448	60,00	45,60	Kecamatan Kadungora		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Memadai	9	Item	219.049.100	3	109.497.500	3	82.619.600	-	-	-	0	-	-	-	3	109.497.500	33,33	49,99	Kecamatan Kadungora		
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	2	Unit	5.050.000.000	2	3.095.487.920	0	0	-	-	-	0	-	-	-	2	3.095.487.920	100,00	61,30	Kecamatan Kadungora		
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	3	Paket	700.000.000	0	0	2	347.962.455	1	139.974.400	1	199.509.400	2	339.483.800	100,00	97,56	2	339.483.800	66,67	48,50	Kecamatan Kadungora	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	Bulan	246.242.243	36	127.837.109	12	38.627.000	3	9.296.086	2	3.159.560	5	12.455.646	41,67	32,25	41	140.292.755	68,33	56,97	Kecamatan Kadungora	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	60	Bulan	82.679.230	36	34.659.577	12	18.405.000	3	2.021.386	2	1.159.560	5	3.180.946	41,67	17,28	41	37.840.523	68,33	45,77	Kecamatan Kadungora	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	15	Item	49.705.110	9	26.799.000	3	5.840.000	2	2.920.000	-	0	2	2.920.000	66,67	50,00	11	29.719.000	73,33	59,79	Kecamatan Kadungora	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	60	bulan	113.857.903	36	65.792.487	12	14.382.000	3	4.354.700	2	2.000.000	5	6.354.700	41,67	44,19	41	72.147.187	68,33	63,37	Kecamatan Kadungora	

7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	Bulan	181.711.339	36	58.032.532	12	37.630.000	3	1.872.500	2	9.096.000	5	10.968.500	41,67	29,15	41	69.001.032	68,33	37,97	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	40	Unit	72.705.395	24	39.468.360	8	37.630.000	2	1.872.500	2	9.096.000	4	10.968.500	50,00	29,15	28	50.436.860	70,00	69,37	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	10	Unit	109.005.944	4	18.564.172	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	4	18.564.172	40,00	17,03	Kecamatan Kadungora
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	500	%	735.101.751	290,53	411.784.650	100	126.930.280	15,80	20.049.420	5,05	6.411.180	20,85	26.460.600	20,85	20,85	311,38	438.245.250	62,28	59,62	Kecamatan Kadungora
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60	Bulan	713.220.256	36	378.611.320	12	103.371.500	3	15.389.100	2	2.304.300	5	17.693.400	41,67	17,12	41	396.304.720	68,33	55,57	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembang	40	Kegiatan	713.220.256	24	378.611.320	8	103.371.500	2	15.389.100	1	2.304.300	3	17.693.400	37,50	17,12	27	396.304.720	67,50	55,57	Kecamatan Kadungora

7	01	04	2.0 2	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	36	kali	60.903.007	12	12.821.400	12	9.453.700	3	-	2	4.953.700	5	4.953.700	41,67	52,40	17	17.775.100	47,22	29,19	Kecamatan Kadungora
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	500	%	897.491.627	291	301.739.819	100	123.774.100	18,71	23.157.700	11,97	14.821.000	30,68	37.978.700	30,68	30,68	321,68	339.718.519	64,34	37,85	Kecamatan Kadungora
7	01	05	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60	Bulan	897.491.627	36	301.739.819	12	123.774.100	3	23.157.700	2	14.821.000	5	37.978.700	41,67	30,68	41	339.718.519	68,33	37,85	Kecamatan Kadungora
7	01	05	2.0 1	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	3	Kali	31.910.717	1	8.374.300	1	22.019.800	-	-	-	0	-	-	-	-	1	8.374.300	33,33	26,24	Kecamatan Kadungora

7	01	05	2.0 1	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	6	Kali	165.500.000	2	12.431.600	2	1.754.300	-	-	-	0	-	-	2	12.431.600	33,33	7,51	Kecamatan Kadungora			
7	01	05	2.0 1	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam	60	Kali	700.080.910	36	280.933.919	12	100.000.000	3	23.157.700	2	14.821.000	5	37.978.700	41,67	37,98	41	318.912.619	68,33	45,55	Kecamatan Kadungora	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	500	%	208.301.340	292,62	88.217.050	100	24.687.800	56,08	13.845.600	18,72	4.621.400	74,80	18.467.000	74,80	74,80	367,42	106.684.050	73,48	51,22	Kecamatan Kadungora	
7	01	06	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60	Bulan	208.301.340	36	88.217.050	12	24.687.800	3	13.845.600	2	4.621.400	5	18.467.000	41,67	74,80	41	106.684.050	68,33	51,22	Kecamatan Kadungora	
7	1	6	2.0 1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20	Kali	45.929.560	12	46.299.300	4	11.479.200	1	1.861.200	1	4.621.400	2	6.482.600	50,00	56,47	14	52.781.900	70,00	114,92	Kecamatan Kadungora	
7	1	6	2.0 1	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat Kemasyarakatan	jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	40	Desa	98.493.158	24	34.313.750	8	1.224.200	-	-	-	0	-	-	-	24	34.313.750	60,00	34,84	Kecamatan Kadungora		
7	1	6	2.0 1	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen RPTK	3	Dokumen	63.878.622	1	7.604.000	1	11.984.400	1	11.984.400	-	0	1	11.984.400	100,00	100,00	2	19.588.400	66,67	30,67	Kecamatan Kadungora	

Sumber: Evaluasi Renja TW II Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 :

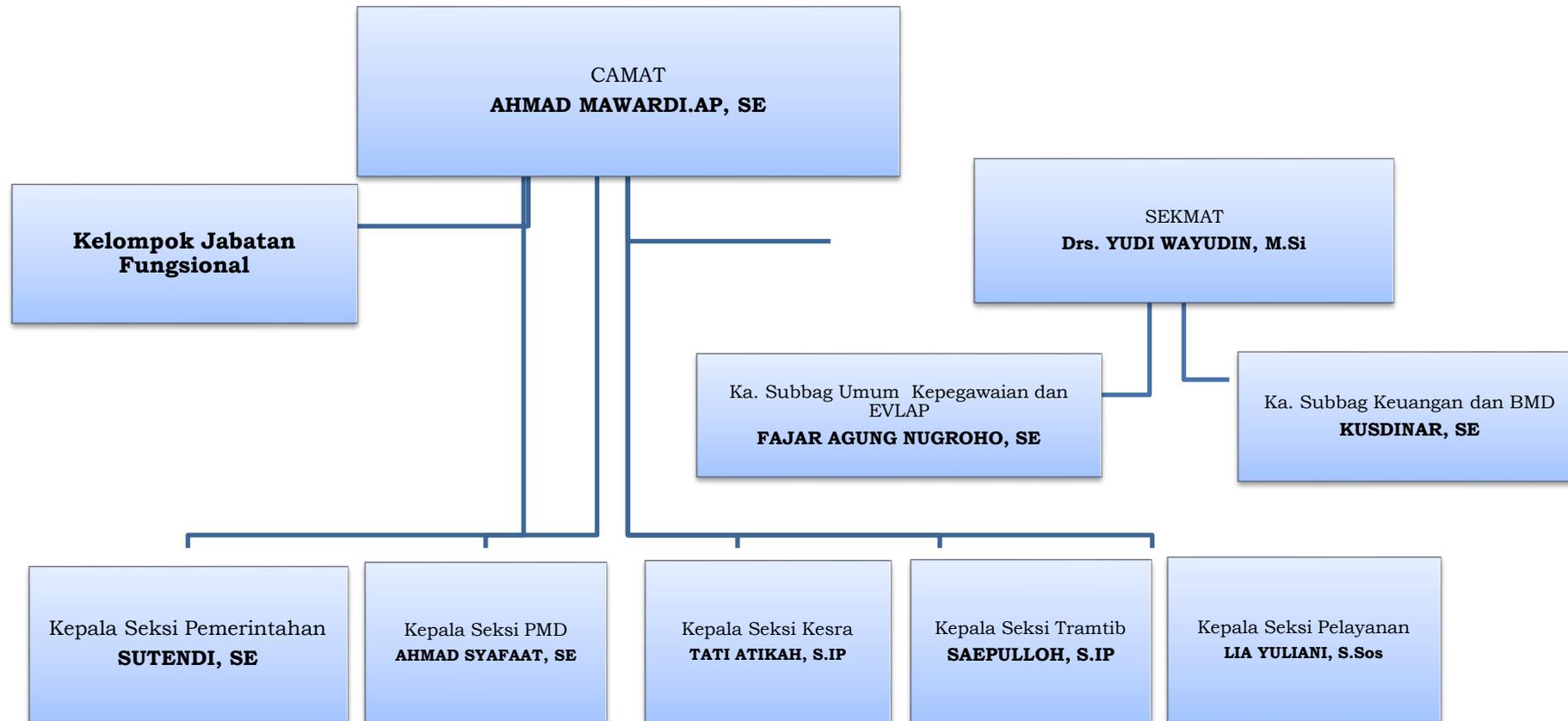
1. Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program (Program 1 s.d. Program 6) adalah 47%.
2. Capaian Kinerja Dan Anggaran Paling Rendah Adalah Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yaitu 22,80%
3. Capaian Kinerja Dan Anggaran Paling Tinggi Adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yaitu 62,12%
4. Faktor-faktor penyebab rendahnya capaian kinerja dan anggaran pada beberapa program diantaranya dikarenakan adanya program dan kegiatan tersebut masih dilaksanakan sampai dengan triwulan III dan IV.
5. Faktor-faktor penyebab tingginya capaian kinerja dan anggaran pada beberapa program diantaranya dikarenakan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan perencanaan. Disamping itu sebagian besar indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
6. Implikasi yang timbul terhadap program yang capaian kinerja dan anggarannya masih rendah, perlu adanya percepatan pencairan anggaran untuk mencapai target sesuai dengan yang telah direncanakan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator - indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing - masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Kecamatan Kadungora sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kadungora Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1
Struktur organisasi Kecamatan Kadungora



Sumber: Perbup No.27 Tahun 2016

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kadungora
Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2024	Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023 s.d TW.II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			82,30	83	83.30	84	81,75	82,5	82,5	81,5	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			65	75	80	90	60,90	7,45	7,95	70,50	
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			90	95	97	100	100	85	95	100	
4	Predikat SAKIP			B	B	BB	BB	B	B	-	BB	

Sumber : Pengolahan Data Kecamatan Kadungora Tahun 2023

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II tahun 2023, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa,
2. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
3. Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
4. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat
5. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik
6. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa
7. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.
8. Belum optimalnya penanggulangan AKI/AKB.
9. Belum optimalnya penanggulangan Stunting.
10. Belum optimalnya penguatan demokrasi.

Adapun hambatan dalam menanggulangi isu-isu strategis yang berkembang selama ini diantaranya :

1. Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap desa.
2. Penyerapan anggaran yang belum 100%.
3. Belum semua pegawai memahami Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).
4. Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik.
6. Lemahnya pemahaman lembaga dan perangkat desa terhadap regulasi yang ada.
7. Keterbatasan lapangan pekerjaan.

8. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang AKI/AKB.
9. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang Stunting.
10. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang demokrasi

2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan Renja

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kadungora serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Kadungora berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kadungora.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran perubahan tahun 2023 yang diusulkan Kecamatan Kadungora sebesar **Rp. 2.907.076.042,-**.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Kadungora diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan

koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan program. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5
Review Terhadap Perubahan RKPD tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kadungora

Lembar.....dari.....

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1.999.457.658	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1.999.457.658	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	8.084.680	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	8.084.680	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah Dokumen Perencanaan	100 %	4.456.180	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah Dokumen Perencanaan	100 %	4.456.180	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Kadungora	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	100%	587.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Kadungora	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	100%	587.800	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Kadungora	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	587.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Kadungora	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	587.800	
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	100 %	587.800	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Kadungora	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	100 %	587.800	
2.1	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 %	587.800	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Kadungora	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 %	587.800	
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Kadungora	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	560.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Kadungora	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	560.400	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	100 %	716.900	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	100 %	716.900	

3.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.332.909.823	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.332.909.823	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kadungora	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	1.331.117.423	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kadungora	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	1.331.117.423	
4.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Kadungora	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	100 %	1.792.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Kadungora	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	100 %	1.792.400	
4.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	23.070.200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	23.070.200	
4.3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 %	8.070.200	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 %	8.070.200	
4.4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Kadungora	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	15.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Kadungora	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	15.000.000	
4.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	93.409.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	93.409.100	
4.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	100 %	3.733.200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	100 %	3.733.200	
4.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	100 %	29.827.200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	100 %	29.827.200	
4.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	100%	1.571.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	100%	1.571.600	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	100 %	16.997.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	100 %	16.997.800	
5.1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	100 %	4.879.200	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	100 %	4.879.200	
5.2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	100%	21.078.200	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	100%	21.078.200	

6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100 %	10.320.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100 %	10.320.000
6.1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 %	5.001.900	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 %	5.001.900
6.2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	465.726.855	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	465.726.855
6.3	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	35.144.800	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	35.144.800
7	Pengadaan Mebel	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	100 %	0	Pengadaan Mebel	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	100 %	0
7.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Kadungora	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Memadai	100 %	82.619.600	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Kadungora	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Memadai	100 %	82.619.600
7.2	Pengadaan Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Kadungora	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	100 %	0	Pengadaan Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Kadungora	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	100 %	0
7.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Kadungora	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	100%	347.962.455	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Kadungora	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	100%	347.962.455
II	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	38.627.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	38.627.000
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kadungora	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	100 %	18.405.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kadungora	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	100 %	18.405.000
1.1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	100 %	5.840.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	100 %	5.840.000
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	100 %	14.382.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	100 %	14.382.000

2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	37.630.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	37.630.000	
2.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	100%	37.630.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	100%	37.630.000	
III	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	100 %	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Kadungora	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	100 %	0	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kadungora	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	126.930.280	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kadungora	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	126.930.280	
1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	103.371.500	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	103.371.500	
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitas Kegiatan Keagamaan, Fasilitas Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	100 %	103.371.500	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitas Kegiatan Keagamaan, Fasilitas Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	100 %	103.371.500	
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	23.558.780	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	23.558.780	

IV	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah pelayanan PATEN di Kecamatan	100 %	23.558.780	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah pelayanan PATEN di Kecamatan	100 %	23.558.780
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Kadungora	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	54.802.500	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Kadungora	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	54.802.500
1.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	100 %	22.575.700	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	100 %	22.575.700
1.2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Kadungora	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	100 %	3.360.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Kadungora	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	100 %	3.360.000
V	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	19.215.700	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	19.215.700
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100 %	32.226.800	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100 %	32.226.800
1.1	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	100%	32.226.800	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	100%	32.226.800
1.2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Kadungora	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	191.408.400	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Kadungora	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	191.408.400
1.3	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	181.954.700	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	181.954.700
VI	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	100 %	119.975.300	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	100 %	119.975.300

	Vertikal di Wilayah Kecamatan										
1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Kadungora	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	100 %	61.979.400	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Kadungora	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	100 %	61.979.400	
1.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	9.453.700	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	9.453.700	
1.2	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	100%	9.453.700	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	100%	9.453.700	
1.3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Kadungora	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	123.774.100	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Kadungora	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	123.774.100	
1.4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	123.774.100	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	123.774.100	
1.5	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Kecamatan Kadungora	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	100%	22.019.800	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Kecamatan Kadungora	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	100%	22.019.800	

	Negara Kesatuan Republik Indonesia					Negara Kesatuan Republik Indonesia					
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Kadungora	jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	100%	1.754.300	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Kadungora	jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	100%	1.754.300	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam	100%	100.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam	100%	100.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Kadungora	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	24.687.800	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Kadungora	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	24.687.800	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	24.687.800	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	24.687.800	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	11.479.200	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Kadungora	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	11.479.200	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Kadungora	jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	100%	1.224.200	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Kadungora	jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	100%	1.224.200	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Kadungora	Jumlah Dokumen RPTK	100%	11.984.400	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Kadungora	Jumlah Dokumen RPTK	100%	11.984.400	
JUMLAH					2.907.076.042						2.907.076.042

Sumber : Rancangan Perubahan RKPD 2023

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kadungora Tahun 2023 dilakukan dengan mendasarkan pada adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja Kecamatan Kadungora Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mempedomani perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra Kecamatan Kadungora tahun 2019-2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut;
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut
4. Meningkatkan keterssediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah.

Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Renstra Kecamatan Kadungora Tahun 2019-2024 yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Visi pembangunan daerah yang merupakan Visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah: "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera".

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
3. Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan Amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang.
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi local dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
 - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
 - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
 - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
 - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
 - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
 - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
 - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
 - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
 - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir
4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
 - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
 - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

Dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integritas dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;

PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;

PPD 3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;

PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;

PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;

PPD 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;

PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;

PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Kecamatan Kadungora merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan misi kedua yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dengan tujuan yang terkait adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, serta sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait adalah PPD 7 yaitu Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur.

Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021, Kecamatan Kabupaten Garut, dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dipimpin oleh Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Tujuan Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 201 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 73 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kadungora Tahun 2019-2024 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan, dengan indikator tujuan Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan

Berikut disajikan Rencana Kinerja Tujuan Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut yang mengacu kepada Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Tabel 3.1
Tujuan dan Indikator Tujuan Yang Mengacu Kepada Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kadungora Tahun 2019-2024

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	81	81,5	82	82,5	83
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Nilai	n/a	65	70	75	80

Sumber : Renstra Perubahan Kecamatan Kadungora Tahun 2019-2024

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Perubahan Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan, dengan indikator sasaran Nilai SKM
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan, dengan indikator sasaran Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dengan indikator sasaran Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan, dengan indikator sasaran Nilai SAKIP Kecamatan.

Berikut disajikan Rencana Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut yang mengacu kepada Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 :

Tabel 3.2
Sasaran dan Indikator Sasaran Yang Mengacu Kepada Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	Nilai	81	81,5	82	82,5	83
2	Meningkatnya Kualitas	Nilai Sinergitas	Nilai	N/A	-	70	75	80

	Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Kinerja Kecamatan						
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persen	n/a	85	90	95	100
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Predikat	CC	CC	B	B	BB

Sumber : Renstra Perubahan Kecamatan Kadungora Tahun 2019-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Kadungora Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan sebanyak 1 bidang urusan yaitu unsur kewilayahan kecamatan.
2. Jumlah program sebanyak 6 program, yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
 - d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
 - e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3. Jumlah Kegiatan sebanyak 14 kegiatan,
4. Jumlah Sub Kegiatan sebanyak 33 Sub Kegiatan.
5. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif untuk rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.907.076.042,- dengan kronologis dari pagu indikatif pada RKPD Tahun 2023 sebesar Rp. 2.985.743.943,- mengalami penyesuaian pada Renja sebesar Rp. 2.575.183.521,-. Sedangkan pada APBD Murni Tahun 2023 dari Rp. 2.575.183.521,- pada Perubahan Renja Tahun 2023 mengalami penyesuaian menjadi sebesar Rp. 2.907.076.042,-, yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tersaji pada table berikut :

Tabel 3.3
Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
									APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah						
7	UNSUR KEWILAYAHAN		500	100	100	100	100	2.985.743.943	2.575.183.521	2.907.076.042	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100	2.800.104.877	Kecamatan Kadungora				
7	01	KECAMATAN	500	100	100	100	100	2.985.743.943	2.575.183.521	2.907.076.042	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100	2.800.104.877	Kecamatan Kadungora				
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	500	100	100	100	2.408.168.743	2.029.502.341	1.999.457.658	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100	2.200.899.380	Kecamatan Kadungora			
7	01	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	12	12	12	12	21.296.100	4.606.180	8.084.680	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12	34.161.840	Kecamatan Kadungora	
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5	1	1	1	1	8.220.700	737.800	4.456.180	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1	9.042.814	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2	0	0	1	1	2.000.200	737.800	587.800	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1	2.000.000	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	0	0	1	1	2.000.200	737.800	587.800	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1	2.000.000	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	2	0	0	1	1	2.000.200	737.800	587.800	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1	2.000.000	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	0	0	1	1	2.000.200	710.400	587.800	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1	2.000.000	Kecamatan Kadungora

7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	0	0	1	1	2.000.000	866.900	560.400	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1	2.000.000	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	10	2	2	2	2	3.074.600	1.358.282.106	716.900	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2	15.119.026	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60	12	12	12	12	1.627.419.743	1.942.400	1.332.909.823	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12	1.790.709.790	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60	12	12	12	12	1.624.202.743	8.070.200	1.331.117.423	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12	1.786.623.620	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	1	1	1	1	3.217.000	15.000.000	1.792.400	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1	4.086.170	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60	12	12	12	12	23.176.210	3.733.200	23.070.200	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12	24.351.870	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	85	17	17	17	17	8.176.210	29.827.200	8.070.200	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			17	9.351.870	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	3	3	3	3	15.000.000	1.571.600	15.000.000	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3	15.000.000	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	12	12	12	12	99.081.600	16.997.800	93.409.100	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12	107.305.541	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	50	10	10	10	10	5.405.200	4.879.200	3.733.200	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10	5.949.836	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	205	41	41	41	41	29.956.300	21.078.200	29.827.200	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			41	31.588.920	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	80	16	16	16	16	2.857.500	12.000.000	1.571.600	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16	4.569.455	Kecamatan Kadungora

7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	60	12	12	12	17.858.200	5.001.900	16.997.800	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12	19.644.020	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	360	72	72	72	4.879.200	35.144.800	4.879.200	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				72	4.752.000	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	6820	1364	1364	1364	20.283.300	82.619.600	21.078.200	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1364	21.175.000	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3000	600	600	600	12.840.000	347.962.455	10.320.000	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				600	14.124.000	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	1	1	1	5.001.900	18.405.000	5.001.900	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1	5.502.310	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60	12	12	12	561.049.530	5.840.000	465.726.855	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12	142.836.430	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10	1	1	1	101.716.400	14.382.000	35.144.800	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1	0	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	10	5	5	0	28.853.600	37.630.000	0	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	60.861.130	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Memadai	60	12	12	12	75.943.200	141.532.280	82.619.600	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12	81.975.300	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Gedung Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Gedung Lainnya Sesuai Kebutuhan	2	0	0	2	354.536.330	117.673.500	347.962.455	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2	0	Kecamatan Kadungora
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	12	12	12	38.865.560	23.858.780	38.627.000	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12	58.608.484	Kecamatan Kadungora

7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	60	12	12	12	12	19.551.960	55.881.300	18.405.000	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12	21.507.156	Kecamatan Kadungora	
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	15	3	3	3	3	7.300.000	3.360.000	5.840.000	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3	7.810.000	Kecamatan Kadungora	
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	60	12	12	12	12	12.013.600	19.452.500	14.382.000	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12	29.291.328	Kecamatan Kadungora	
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	12	12	12	12	37.280.000	33.068.800	37.630.000	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12	42.925.425	Kecamatan Kadungora	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	40	8	8	8	8	37.280.000	194.000.400	37.630.000	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8	20.593.375	Kecamatan Kadungora	
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	10	0	0	0	0	0	120.885.300	0	0	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	22.332.050	Kecamatan Kadungora
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	500	100	100	100	100	108.937.200	62.610.900	126.930.280	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100	84.122.940	Kecamatan Kadungora	
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	60	12	12	12	12	35.239.600	10.504.200	103.371.500	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12	41.727.400	Kecamatan Kadungora	
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	40	8	8	8	8	35.239.600	124.405.600	103.371.500	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8	41.727.400	Kecamatan Kadungora	

7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	60	12	12	12	12	73.697.600	22.440.800	23.558.780	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12	42.395.540	Kecamatan Kadungora
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan PATEN di Kecamatan	20	4	4	4	4	73.697.600	1.964.800	23.558.780	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4	42.395.540	Kecamatan Kadungora
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	500	100	100	100	100	138.474.000	100.000.000	54.802.500	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100	152.115.700	Kecamatan Kadungora
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	60	12	12	12	12	35.274.000	29.861.600	22.575.700	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12	38.595.700	Kecamatan Kadungora
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	5	1	1	1	1	6.099.200	16.442.500	3.360.000	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1	6.582.400	Kecamatan Kadungora
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	4	4	4	4	29.174.800	1.434.700	19.215.700	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4	32.013.300	Kecamatan Kadungora
7	01	03	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	24	12	12	12	12	103.200.000	11.984.400	32.226.800	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12	113.520.000	Kecamatan Kadungora
7	01	03	2,05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2	1	1	1	1	103.200.000	2.575.183.521	32.226.800	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1	113.520.000	Kecamatan Kadungora
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	500	100	100	100	100	154.926.600	2.029.502.341	191.408.400	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100	184.475.390	Kecamatan Kadungora
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60	12	12	12	12	145.678.600	4.606.180	181.954.700	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12	159.769.060	Kecamatan Kadungora

7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	20	4	4	4	4	127.972.000	737.800	119.975.300	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4	140.474.400	Kecamatan Kadungora
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	5	1	1	1	1	17.706.600	737.800	61.979.400	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1	19.294.660	Kecamatan Kadungora

7	01	04	2,02		Koordinasi dan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3	1	1	1	1	9.248.000	737.800	9.453.700	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1	24.706.330	Kecamatan Kadungora
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	36	12	12	12	12	9.248.000	737.800	9.453.700	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12	24.706.330	Kecamatan Kadungora
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	500	100	100	100	100	135.202.200	710.400	123.774.100	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100	135.276.867	Kecamatan Kadungora
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60	12	12	12	12	135.202.200	866.900	123.774.100	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12	135.276.867	Kecamatan Kadungora
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	3	1	1	1	1	22.440.800	1.358.282.106	22.019.800	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1	11.665.247	Kecamatan Kadungora

Tabel 3.4
Perubahan Rencana Kerja
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Garut
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Kadungora
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Kadungora

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Target Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Target Kinerja		Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah						
						Program	Keluaran Sub Kegiatan									Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target			
7																					
7	01																				
7	01	01																			
7	01	01	2,01																		
UNSUR KEWILAYAHAN																					
KECAMATAN																					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	8.220.700	4.456.180	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	9.042.814
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	2.000.200	587.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.000.000
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	2.000.200	587.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.000.000
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	2.000.200	587.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.000.000

7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran, dan Evaluasi	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	2.000.200	587.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di	100 %	2.000.000
						Tingkat Kecamatan	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kinerja Perangkat Daerah											Tingkat Kecamatan		
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	2.000.000	560.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.000.000
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	3.074.600	716.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	15.119.026
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											1.627.419.743	1.332.909.823			1.790.709.790	
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %		10 Orang		12 Bulan		1.624.202.743	1.331.117.423	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1.786.623.620
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %		1 Laporan		12 Bulan		3.217.000	1.792.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	4.086.170
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											23.176.210	23.070.200			24.351.870	
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %		17 Paket		12 Bulan		8.176.210	8.070.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	9.351.870
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %		3 Orang		12 Bulan		15.000.000	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	15.000.000

7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								99.081.600	93.409.100				107.305.541			
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %		1 Paket		12 Bulan	5.405.200	3.733.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5.949.836
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %		3 Jenis		12 Bulan	29.956.300	29.827.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	31.588.920
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %		1 Paket		12 Bulan	2.857.500	1.571.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	4.569.455
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %		2 jenis		12 Bulan	17.858.200	16.997.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	19.644.020
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %		12 Dokumen		12 Bulan	4.879.200	4.879.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	4.752.000
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %		11 Bulan		12 Bulan	20.283.300	21.078.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	21.175.000
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %		12 Laporan		12 Bulan	12.840.000	10.320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	14.124.000
7	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %		1 Dokumen		12 Bulan	5.001.900	5.001.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5.502.310
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								561.049.530	465.726.855				142.836.430			
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %		3 Unit		12 Bulan	101.716.400	35.144.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	0

7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	12 Bulan	28.853.600	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di	100 %	60.861.130
						Tingkat Kecamatan		Pemerintah Daerah								Tingkat Kecamatan		
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	4 Jenis	12 Bulan	75.943.200	82.619.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	81.975.300
7	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	1 Gedung	12 Bulan	354.536.330	347.962.455	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	0
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										38.865.560	38.627.000		58.608.484
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Bulan	19.551.960	18.405.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	21.507.156
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	12 Bulan	7.300.000	5.840.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	7.810.000
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Bulan	12.013.600	14.382.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	29.291.328
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										37.280.000	37.630.000		42.925.425
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	12 Bulan	37.280.000	37.630.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	20.593.375

7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	Jumlah Pelaksanaa n Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %		2 Unit		12 Bulan		0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	22.332.050
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										108.937.200	126.930.280					84.122.940	
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										35.239.600	103.371.500					41.727.400	
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggara n Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksana an Koordina s Penyeleng garaan Kegiatan Pemerint ahan di Tingkat Kecamata n	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %		8 Dokumen		12 Bulan		35.239.600	103.371.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelengga raan Kegiatan Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang	100 %	41.727.400
						oleh Kecamatan														dilaksana n oleh Kecamatan		
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan										73.697.600	23.558.780					42.395.540	
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggara n Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksana an Penyeleng garaan Urusan Pemerintah an Yang Tidak Dilaksana n Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %		4 Laporan		12 Bulan		73.697.600	23.558.780	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelengga raan Kegiatan Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang dilaksana n oleh Kecamatan	100 %	42.395.540
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										138.474.000	54.802.500					152.115.700	
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										35.274.000	22.575.700					38.595.700	
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksa naan Koordin asi Kegiatan Pember dayaan desa	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan Kab. Garut, Kadungora, Kadungora	100 %		8 Desa		8 Desa		6.099.200	3.360.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayaka n	100 %	6.582.400
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksa naan Koordin asi Kegiatan Pember dayaan desa	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %		12 Laporan		8 Desa		29.174.800	19.215.700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayaka n	100 %	32.013.300
7	01	03	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)										103.200.000	32.226.800					113.520.000	

7	01	03	2,05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %		1 Dokumen	12 Bulan		103.200.000	32.226.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	113.520.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								154.926.600	191.408.400				184.475.390		
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								145.678.600	181.954.700				159.769.060		
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %		12 Laporan	12 Bulan		127.972.000	119.975.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	140.474.400
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %		1 Laporan	12 Bulan		17.706.600	61.979.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	19.294.660
	01	04	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								9.248.000	9.453.700				24.706.330		
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %		12 Laporan	12 Bulan		9.248.000	9.453.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	24.706.330
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								135.202.200	123.774.100				135.276.867		
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								135.202.200	123.774.100				135.276.867		

7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	ersentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 Orang	12 Bulan	22.440.800	22.019.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ersentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 % 100 %	11.665.247	
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	ersentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 % 100 %	50 Orang	12 Bulan	12.761.200	1.754.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ersentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 % 100 %	13.611.400	
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	ersentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 % 100 %	12 Dokumen	12 Bulan	100.000.200	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	ersentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang	100 % 100 %	110.000.220	
						Kepada Camat Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat		Dilimpahkan Kepada Camat								dilimpahkan Kepada Camat Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat			
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							40.035.200	24.687.800					43.214.600	
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							40.035.200	24.687.800						43.214.600
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawas	Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	12 Bulan	20.500.400	11.479.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	21.821.800	

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah untuk mencapai keselarasan yang berlandaskan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang tentunya memperhatikan kemampuan keuangan daerah, target kinerja yang sudah ditetapkan dan untuk mengakomodir pendanaan DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi.

Dokumen Perencanaan ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan di Bappeda tahun 2023. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan/SKPD Kabupaten Garut tahun 2023 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut serta peran aktif *stakeholder* dalam mencapai target kinerja serta tujuan dan sasaran perangkat daerah.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN